Laporan Keuangan Semester I 2026

KPU Kabupaten Malaka

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

KPU Kabupaten Malaka adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Malaka. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Betun, 22 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Marsel D I Taneo, SH

NIP. 197003251998031011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iv

Ringkasan Laporan v

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 4

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 6
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 12
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 19
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

C.27 Aset Tetap Lainnya
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
C.32 Aset Tak Berwujud
C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 35
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 41
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya 42

VI. Lampiran dan Daftar 43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Malaka yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Betun, 22 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Marsel D I Taneo, SH

NIP. NIP. 197003251998031011

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Malaka Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.619.344.640 atau mencapai 62,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.180.852.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2026 . Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp864.785.685 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp159.231.500; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp705.554.185 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp227.605.454 dan Rp637.180.231

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.864.899.021 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-2.864.899.021, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-2.864.899.021.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp882.734.612, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-2.864.899.021 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.619.344.640 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp637.180.231

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

U R A I A N	Catatan	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	27.728.300
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**-**	**27.728.300**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.531.781.000	2.167.916.040	61,38	1.544.760.001
Belanja Barang	B.2.2	649.071.000	451.428.600	69,55	2.475.722.304
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	316.602.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**4.180.852.000**	**2.619.344.640**	**62,65**	**4.337.084.305**

Betun, 22 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Marsel D I Taneo, SH
NIP. 197003251998031011

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

U R A I A N	Catatan	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	18.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.731.500	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	137.500.000	62.500.000
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan P	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		**159.231.500**	**62.500.000**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	3.117.253.601	3.117.253.601
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	6.325.000	6.325.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(2.418.024.416)	(2.250.531.393)
Aset Konsesi Jasa	C.35		
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36		
Jumlah Aset Tetap		**705.554.185**	**873.047.208**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	76.010.000	76.010.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(76.010.000)	(76.010.000)
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**864.785.685**	**935.547.208**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	205.873.954	52.812.596
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	18.000.000	-

Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	3.731.500	-

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**227.605.454**	**52.812.596**
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**227.605.454**	**52.812.596**
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	637.180.231	882.734.612
JUMLAH EKUTAS		**637.180.231**	**882.734.612**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**864.785.685**	**935.547.208**

Betun, 22 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Marsel D I Taneo, SH
NIP. 197003251998031011

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		**-**	**-**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	2.320.977.398	1.678.933.810
Beban Persediaan	D.4	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	282.654.400	1.794.393.410
Beban Pemeliharaan	D.6	59.554.200	24.732.904
Beban Perjalanan Dinas	D.7	34.220.000	751.224.240
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	167.493.023	181.628.601
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**2.864.899.021**	**4.430.912.965**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(2.864.899.021)**	**(4.430.912.965)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	27.727.800
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	-	26.030.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**-**	**53.758.300**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(2.864.899.021)**	**(4.377.154.665)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Beban Luar Biasa		-	-
0		-	-
0		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(2.864.899.021)**	**(4.377.154.665)**

Betun, 22 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Marsel D I Taneo, SH
NIP. 197003251998031011

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	**882.734.612**	**6.218.675.003**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(2.864.899.021)**	**(4.377.154.665)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**(2.552.753.170)**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	(2.552.753.170)
Jumlah		**-**	**(2.552.753.170)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.619.344.640	1.763.700.005
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(245.554.381)	(5.166.207.830)
EKUITAS AKHIR	E.6	**637.180.231**	**1.052.467.173**

Betun, 22 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Marsel D I Taneo, SH
NIP. 197003251998031011

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka didirikan sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Standar Organisasi dan Tata Kerja KPU. Entitas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kota Betun Kabupaten Malaka. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka berkomitmen dengan visi "Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuagan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas"

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah - langkah strategis sebagai berikut:

* Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian
* Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya
* Menyelenggarakan sistem dukungan pengembalian keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN MALAKA





A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Malaka. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Malaka. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ... ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2026	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	2.619.394.000	3.531.781.000
Belanja Barang	637.511.000	649.071.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**3.256.905.000**	**4.180.852.000**

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan KPU Kabupaten Malaka terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2026		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	27.728.300	(100,00)
Jumlah	**-**	**27.728.300**	**(100,00)**

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2026 sebesar 0,00 dari TA 2025 Tidak Ada. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp27.728.300. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2026 mengalami penurunan sebesar 100,00 dari TA 2025 pada semester 1 tahun 2026 tidak terdapat penerimaan PNBP sedangkan semester 1 tahun 2025 terdapat penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp500 atas pengajuan kekurangan gaji PPPK tahun 2024 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp27.727.800 berupa Hasil Lelang Logistik Pemilu 2024 sesuai Risalah Lelang Nomor 26/14.05/2025-01 tanggal 17 Maret 2025. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	27.728.300	(100,00)
Jumlah	**-**	**27.728.300**	**(100,00)**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pengembalian Sisa Dari Dana Kampanye	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	500	(100,00)
Jumlah	**-**	**27.728.300**	**(100,00)**

Realisasi Belanja Rp2.619.344.640

B.2 Belanja

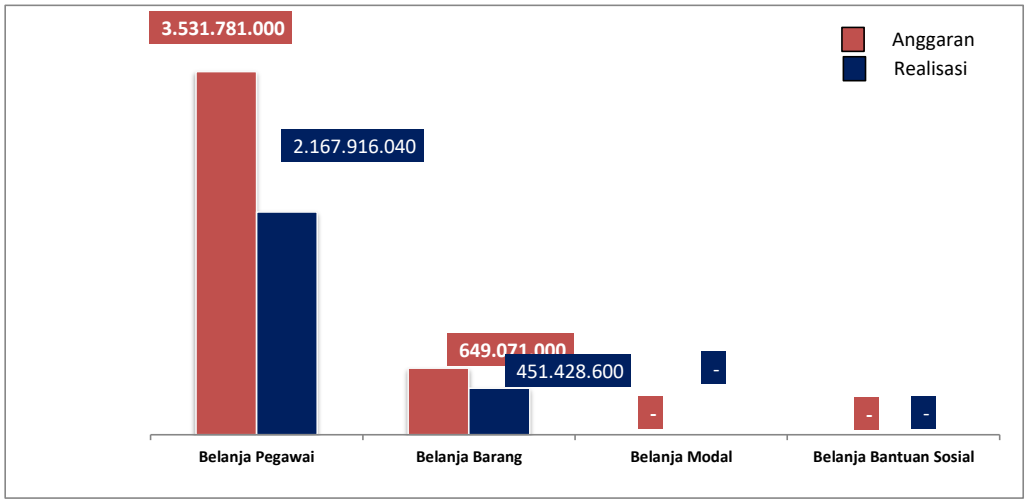
Realisasi Belanja pada TA 2026 adalah sebesar Rp2.619.344.640 atau 62,65 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.180.852.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.531.781.000	2.167.916.040	61,38
Belanja Barang	649.071.000	451.428.600	69,55
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.180.852.000**	**2.619.344.640**	**62,65**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2026



Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi Belanja TA 2026 mengalami penurunan sebesar 39,61% 1. Terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai di karenakan terdapat perubahan berupa penambahan pegawai PPPK sebanyak 3 orang dan CPNS sebanyak 7 orang serta pengangkatan pejabat fungsional sebanyak 3 orang.
2. Terdapat penurunan realisasi belanja barang di karenakan pada semester 1 tahun 2025 terdapat belanja barang untuk keperluan pasca pilkada tahun 2024 sedangkan semester 1 tahun 2026 hanya belanja barang rutin untuk keperluan operasional perkantoran.
3. pada semester 1 tahun 2026 tidak terdapat belanja modal.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2026 dan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Pegawai	2.167.916.040	1.544.760.001	40,34
Belanja Barang	451.428.600	2.475.722.304	(81,77)
Belanja Modal	-	316.602.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**2.619.344.640**	**4.337.084.305**	**(39,61)**

Realisasi Belanja Pegawai Rp2.167.916.040

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.167.916.040 dan Rp1.544.760.001. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 40,34 % dari TA 2025. Hal ini disebabkan Adanya Kenaikan belanja pegawai di karenakan tahun 2026 terdapat pengangkatan 3 pejabat fungsional

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Gaji Pokok PNS	458.949.960	338.571.820	35,55
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.283	4.902	28,17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33.878.976	30.222.812	12,10
Belanja Tunj. Anak PNS	11.597.328	10.733.235	8,05
Belanja Tunj. Struktural PNS	27.360.000	27.360.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.340.000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	4.191.462	3.823.892	9,61
Belanja Tunj. Beras PNS	28.968.000	23.319.240	24,22
Belanja Uang Makan PNS	70.054.000	30.344.000	130,87
Belanja Tunjangan Umum PNS	16.940.000	10.095.000	67,81
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	499.096.102	367.046.639	35,98
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	**2.169.581.190**	**1.544.760.201**	**40,45**
Pengembalian Belanja Pegawai	1.665.150	200	832.475,00
Jumlah Belanja	**2.167.916.040**	**1.544.760.001**	**40,34**

Realisasi Belanja Barang Rp451.428.600

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp451.428.600 dan Rp2.475.722.304. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2026 mengalami penurunan sebesar 81,77% dari Realisasi TA 2025.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang disebabkan karena belanja difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional rutin kantor

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional	117.599.800	46.739.400	151,61
Belanja Barang Non Operasional	1.350.000	1.374.296.160	(99,90)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Jasa	238.704.600	279.526.600	(14,60)
Belanja Pemeliharaan	59.554.200	23.935.904	148,81
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	34.220.000	751.224.240	(95,44)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**451.428.600**	**2.475.722.304**	**(81,77)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**451.428.600**	**2.475.722.304**	**(81,77)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2026

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2026	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp316.602.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2026 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2025 disebabkan oleh Terdapat penurunan realisasi Belanja Modal di karenakan pada semester 1 tahun 2026 tidak terdapat belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	316.602.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**316.602.000**	**(100,00)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**316.602.000**	**(100,00)**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2026 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2025 . Hal ini disebabkan oleh Tidak Ada.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp316.602.000, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan oleh Penurunan Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin karena pada semester 1 Tahun 2026 tidak terdapat pembelian peralatan dan mesin di tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	316.602.000	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**316.602.000**	**(100,00)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**316.602.000**	**(100,00)**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2025. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan Tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2025. Hal ini disebabkan Tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2026 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2025. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp18.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.18.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Kas UP di Bendahara	18.000.000	-
Kas TUP di Bendahara	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**18.000.000**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan Kas atas Uang Persediaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3.731.500

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3.731.500 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Kas Lainnya dan Setara Kas	3.731.500,00	-
Jumlah	**3.731.500**	**-**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan setoran pajak bulan Juni yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan Nomor NTPN : Honorarium bulan Mei 2026 : 840794F9TFMJV20T, Pakaian dinas/pakaian seragam (PPN) : 9004F5BNBE21T7BU, Pakaian dinas/pakaian seragam (PPh) : B916F016CS5IC470, Paket perbaikan atap gedung kantor (PPN) : 92A8A016E8D42CR0, Paket perbaikan atap gedung kantor (PPh) : 058025BNDRH187NQ

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp137.500.000

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp137.500.000 dan Rp62.500.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	137.500.000,00	62.500.000,00
Jumlah	**137.500.000**	**62.500.000**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Belanja Barang dibayar dimuka yaitu terdiri dari:
1. Realisasi Tahun 2026 merupakan sisa bayar di muka sewa kantor tahun 2025, sisa untuk bulan Januari 2026-Mei 2026 sebesar Rp62.500.000. Nomor Kontrak: 06PPK-SPj/5321/2025, tanggal 2 Juni 2025, nilai kontrak 150.000.000 untuk 12 bulan dengan besaran per bulan Rp12.500.000.
2. Realisasi tahun 2026 merupakan sisa bayar di muka sewa kantor tahun 2026, sisa untuk bulan Juli 2026-Mei 2027 sebesar Rp137.500.000 Nomor Kontrak: 01/PPK-SPj/5321/2026, tanggal 2 Juni 2026, nilai kontrak 150.000.000 untuk 12 bulan dengan besaran per bulan Rp12.500.000

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Tidak ada

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Tidak ada

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Semester I TA 2026 dan 2025

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester I TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**1.000.000**		**5.000**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2026 dan 2025

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**#VALUE!**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2026 dan 2025

Jenis	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2026 dan 2025

Jenis	TAHUN 2026	TAHUN 2025
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**#VALUE!**

Persediaan Rp0

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2026 dan 2025

Jenis	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Barang Konsumsi	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan tersebut di atas dalam Tidak adanya persediaan karena sudah dipakai

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2026. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		**-**	**-**

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2026 dan 2025

Debitur	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2026 dan 2025

Debitur	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2026 dan 2025

U R A I A N	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2026 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2026 dan 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2026 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2026 dan 2025

U R A I A N	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada Kenaikan . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	**-**
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	**-**

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2026

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak Ada

Tanah Belum Diregister Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp3.117.253.601

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp3.117.253.601 dan Rp3.117.253.601. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	**3.117.253.601**
Mutasi tambah:	
Jenis Transaksi	-
Pembelian	-
Hibah (Masuk)	-
Mutasi Kurang:	
Jenis Transaksi	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	**3.117.253.601**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(2.418.024.416)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**699.229.185**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Tidak ada

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada pengurangan
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	**-**
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp6.325.000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.6.325.000 dan Rp.6.325.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	**6.325.000**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2026	**6.325.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**6.325.000**

Mutasi tambah/kurang:
Tidak Ada

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2026	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.418.024.416

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp2.418.024.416 dan Rp2.250.531.393. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2026

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.117.253.601	(2.418.024.416)	699.229.185
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	6.325.000	-	6.325.000
Akumulasi Penyusutan		**3.123.578.601**	**(2.418.024.416)**	**705.554.185**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disedikan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2026 dan 2025

U R A I A N	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2026

No	U r a i a n	Jumlah
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Kabupaten Malaka berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2026	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2026	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2026	T.A. 2025
Dana Lainnya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2026	T.A. 2025
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp76.010.000

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp76.010.000 dan Rp76.010.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2026	**76.010.000**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2026	**76.010.000**
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2026	(76.010.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak Ada
- -
- -

Mutasi Kurang

- -
- -
- -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 76.010.000

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp76.010.000 dan Rp76.010.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	76.010.000	(76.010.000)	-
-	-	-	-
Total	**76.010.000**	**(76.010.000)**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp205.873.954

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp205.873.954 dan Rp52.812.596. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	205.873.954	52.812.596
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
	-	-
Total	**205.873.954**	**52.812.596**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar disemester 1 Tahun 2026 merupakan :
1. Gaji Induk PNS Bulan Juli sebesar 72.881.383
2. Gaji Induk PPPK Bulan Juli sebesar 34.927.975
3. Penghasilan Komisioner Bulan Juli Sebesar 59.115.000
4. Tunjangan PPPK Tahun 2025 yang dibayarkan di Bulan Januari 2026, meliputi : Tukin PPPK Bulan Desember 2025 sebesar 28.404.596, Uang makan PPPK Bulan November 202t sebesar 3.580.000, Uang makan PPPK Desember 2025 sebesar 6.965.000

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Yang belum disahkan untuk Keperluan Pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2024

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN Rp18.000.000

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp18.000.000 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	18.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**18.000.000**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp3.731.500

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3.731.500 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	3.731.500	-
Total	**3.731.500**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang pajak bulan juni yang telah disetorkan pada tanggal 22 Juli

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A.2025
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas Rp637.180.231

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp637.180.231. dan Rp882.734.612. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	2026	2025	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Formulir Plano oleh PT Inpera Pratama Indonesia dalam Pemilu 2024. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	2026	2025	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp2.320.977.398

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.320.977.398 dan Rp1.678.933.810.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2026 sebesar 38,24 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh Kenaikan Beban pegawai tahun 2026 dikarenakan terdapat penambahan pegawai PPPK sebanyak 3 orang dan CPNS sebanyak 7 orang serta pengangkatan fungsional sebanyak 3 orang. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Gaji Pokok PNS	515.628.080	379.391.720	35,91
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.954	5.413	28,47
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38.113.848	33.986.142	12,15
Beban Tunj. Anak PNS	13.046.994	12.083.427	7,97
Beban Tunj. Struktural PNS	30.780.000	30.780.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	12.960.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	4.208.516	3.840.945	9,57
Beban Tunj. Beras PNS	32.589.000	26.143.620	24,65
Beban Uang Makan PNS	56.191.000	30.344.000	85,18

Beban Tunjangan Umum PNS	17.114.850	11.195.000	52,88
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	499.096.102	367.046.639	35,98
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	535.375.440	535.375.440	-
Beban Gaji Pokok PPPK	229.370.173	108.540.798	111,32
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.250.370	6.517.332	164,68
Beban Tunjangan Anak PPPK	5.650.523	1.474.994	283,09
Beban Tunjangan Beras PPPK	16.403.130	5.781.530	183,72
Beban Uang Makan PPPK	34.846.000	10.406.000	234,86
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	232.851.773	90.099.453	158,44
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.645	1.357	242,30
Jumlah	**2.320.977.398**	**1.678.933.810**	**38,24**

Beban Persediaan Rp0

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2026 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh Tidak Ada. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**-**	**-**	**-**

Beban Barang dan Jasa Rp282.654.400

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp282.654.400 dan Rp1.794.393.410.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 84,25 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh Penurunan Beban Barang dan Jasa di Tahun 2026 dikarenakan belanja difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional rutin kantor . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Keperluan Perkantoran	79.389.800	28.404.900	179,49
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.210.000	22.140.000	(17,75)
Beban Barang Operasional Lainnya	20.000.000	-	-
Beban Sewa	75.000.000	212.495.700	(64,71)
Beban Bahan	1.350.000	92.775.350	(98,54)
Beban Honor Output Kegiatan	-	767.920.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	513.600.810	(100,00)
Beban Langganan Listrik	59.889.800	20.086.500	198,16
Beban Langganan Telepon	630.000	684.000	(7,89)
Jumlah	**282.654.400**	**1.794.393.410,00**	**(84,25)**

Beban Pemeliharaan Rp59.554.200

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp59.554.200 dan Rp24.732.904.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 140,79 persen dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan serta beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai cukup besar tahun ini Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.295.000	532.000	1.271,24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.259.200	24.200.904	115,94
Jumlah	**59.554.200**	**24.732.904**	**140,79**

Beban Perjalanan Dinas Rp34.220.000

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp34.220.000 dan Rp751.224.240

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 95,44 persen disebabkan oleh Penurunan Beban Perjalanan di semester 1 Tahun 2026 disebabkan berkurangnya kegiatan perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2026 dan 2025 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Perjalanan Biasa	34.220.000	728.824.240	(95,30)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	22.400.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	**34.220.000,00**	**751.224.240**	**(95,44)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2025	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2026 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp167.493.023

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp167.493.023 dan Rp181.628.601.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	167.493.023	181.628.601	(7,78)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumah Penyusutan	***167.493.023***	***181.628.601***	***(7,78)***
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	**167.493.023**	**181.628.601**	**(7,78)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.727.800

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
	-	27.727.800,00	(100)
	-	-	-
Jumlah	**-**	**27.727.800**	**(100)**

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp26.030.500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	500,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**26.030.500**	**(100,00)**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp882.734.612,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.882.734.612,00 dan Rp.6.218.675.003,00

Defisit LO Rp.2.864.899.021,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.2.864.899.021,00 dan Rp.4.377.154.665,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-2.552.753.170 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2026

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2026

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-2.552.753.170. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2026

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp2.619.344.640

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.2.619.344.640 dan Rp.1.763.700.005. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2026

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.619.344.640
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	**2.619.344.640**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DKEL sebesar Rp 2.619.344.640, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2026

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2026

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2026 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp637.180.231

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.637.180.231,00 dan Rp.1.052.467.173,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026, berikut Pengelola Keuangan :

1. Marsel D l Taneo/NIP 197003021998031011 sebagai KPA/PPK
2. Veronika A Bria / NIP. 198304012009022007 sebagai PPSPM
3. Albert Pieter DJapaole/ NIP 198212152009021002 sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa
4. Maria Fatima B Seo/NIP. 199005182015032005 Sebagai Bendahara Pengeluaran
5. Dewinda Galuh Rahma Putri/NIP. 199806042025062006 sebagai Staf Pengelola Keuangan
6. Frendi Hiranda/NIP. 199410282025061005 sebagai Staf Pengelola Keuangan
7. Veronica Jacoba Juwita Ure Manuk sebagai Staf Pengelola Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN MALAKA 242205

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,728,300**	**(27,728,300)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	27,728,300	(27,728,300)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,728,300**	**(27,728,300)**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,180,852,000	2,619,344,640	(1,561,507,360)	63	8,516,850,000	4,337,084,305	4,179,765,695	51
1. Belanja Pegawai	3,531,781,000	2,167,916,040	(1,363,864,960)	61	2,935,078,000	1,544,760,001	1,390,317,999	53
2. Belanja Barang	649,071,000	451,428,600	(197,642,400)	70	5,090,104,000	2,475,722,304	2,614,381,696	49
3. Belanja Modal	0	0	0	0	491,668,000	316,602,000	175,066,000	64
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076

ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01

SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN MALAKA 242205

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**4,180,852,000**	**2,619,344,640**	**(1,561,507,360)**	**63**	**8,516,850,000**	**4,337,084,305**	**4,179,765,695**	**51**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIAT

MARSEL D. I. TANEO
NIP 197003251998031011

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0	18,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,731,500	0	3,731,500	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	137,500,000	62,500,000	75,000,000	120.00
JUMLAH ASET LANCAR	**159,231,500**	**62,500,000**	**96,731,500**	**154.77**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,117,253,601	3,117,253,601	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,325,000	6,325,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,418,024,416)	(2,250,531,393)	(167,493,023)	7.44
JUMLAH ASET TETAP	**705,554,185**	**873,047,208**	**(167,493,023)**	**(19.18)**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	76,010,000	76,010,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(76,010,000)	(76,010,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**864,785,685**	**935,547,208**	**(70,761,523)**	**(7.56)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	205,873,954	52,812,596	153,061,358	289.82
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0	18,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3,731,500	0	3,731,500	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**227,605,454**	**52,812,596**	**174,792,858**	**330.97**
JUMLAH KEWAJIBAN	**227,605,454**	**52,812,596**	**174,792,858**	**330.97**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	637,180,231	882,734,612	(245,554,381)	(27.82)
JUMLAH EKUITAS	**637,180,231**	**882,734,612**	**(245,554,381)**	**(27.82)**
JUMLAH EKUITAS	**637,180,231**	**882,734,612**	**(245,554,381)**	**(27.82)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**864,785,685**	**935,547,208**	**(70,761,523)**	**(7.56)**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,731,500	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	137,500,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,117,253,601	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,325,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,418,024,416
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	76,010,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	76,010,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	205,873,954
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	18,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	3,731,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,619,344,640
0.0	391111	Ekuitas	0	882,734,612
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	515,628,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,954	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38,113,848	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,046,994	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,780,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	12,960,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,208,516	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,589,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	56,191,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17,114,850	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	535,375,440	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	229,370,173	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,645	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,250,370	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,650,523	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23,310,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	16,403,130	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	34,846,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	6,180,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	499,096,102	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	232,851,773	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	79,389,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,210,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	20,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,350,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	59,889,800	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	630,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	75,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	28,184,800	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,295,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,259,200	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34,220,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	167,493,023	0
JUMLAH			**6,223,719,122**	**6,223,719,122**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 28/07/26 3:37 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,619,344,640
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	458,949,960	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,283	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33,878,976	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,597,328	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11,340,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,191,462	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,968,000	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	70,054,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,940,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	476,260,440	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	202,656,473	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,144	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,081,300	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,981,159	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,610,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,447,790	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	34,846,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5,460,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	499,096,102	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	232,851,773	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	79,389,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,210,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,350,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	59,889,800	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	630,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	150,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	28,184,800	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,295,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,259,200	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,220,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,665,150
JUMLAH			**2,621,009,790**	**2,621,009,790**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO
197003251998031011

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 28/07/26 3:37 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	882,734,612	6,218,675,003	(5,335,940,391)	(85.81)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,864,899,021)	(4,377,154,665)	1,512,255,644	(34.55)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(2,552,753,170)	2,552,753,170	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	(2,552,753,170)	2,552,753,170	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,619,344,640	1,763,700,005	855,644,635	48.51
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(245,554,381)	(5,166,207,830)	4,920,653,449	(95.25)
EKUITAS AKHIR	637,180,231	1,052,467,173	(415,286,942)	(39.46)

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ESELON I : **(01) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

WILAYAH/PROVINSI : **(2400) NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(242205) KPU KABUPATEN MALAKA**

Tgl Data : 28/07/26 3:47 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:00 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,320,977,398	1,678,933,810	642,043,588	38.241
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	282,654,400	1,794,393,410	(1,511,739,010)	(84.248)
Beban Pemeliharaan	59,554,200	24,732,904	34,821,296	140.789
Beban Perjalanan Dinas	34,220,000	751,224,240	(717,004,240)	(95.445)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ESELON I : **(01) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

WILAYAH/PROVINSI : **(2400) NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(242205) KPU KABUPATEN MALAKA**

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	167,493,023	181,628,601	(14,135,578)	(7.783)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,864,899,021	4,430,912,965	(1,566,013,944)	(35.343)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,864,899,021)	(4,430,912,965)	1,566,013,944	(35.343)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	27,727,800	(27,727,800)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	27,727,800	(27,727,800)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	26,030,500	(26,030,500)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	26,030,500	(26,030,500)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	53,758,300	(53,758,300)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,864,899,021)	(4,377,154,665)	1,512,255,644	(34.549)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,864,899,021)	(4,377,154,665)	1,512,255,644	(34.549)

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN MALAKA 242205

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**27,728,300**	**27,728,300**	**0**	**0**	**42,061**	**(42,061)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	27,728,300	27,728,300	0	0	42,061	(42,061)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**27,728,300**	**27,728,300**	**0**	**0**	**42,061**	**(42,061)**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,516,850,000	4,337,084,305	(4,179,765,695)	51	25,996,148,000	20,070,538,327	5,925,609,673	77
1. Belanja Pegawai	2,935,078,000	1,544,760,001	(1,390,317,999)	53	1,990,428,000	1,326,688,417	663,739,583	67
2. Belanja Barang	5,090,104,000	2,475,722,304	(2,614,381,696)	49	23,629,720,000	18,743,849,910	4,885,870,090	79
3. Belanja Modal	491,668,000	316,602,000	(175,066,000)	64	376,000,000	0	376,000,000	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN MALAKA 242205

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**8,516,850,000**	**4,337,084,305**	**(4,179,765,695)**	**51**	**25,996,148,000**	**20,070,538,327**	**5,925,609,673**	**77**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Betun, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIAT

MARSEL D. I. TANEO
NIP 197003251998031011

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	27,000,000	0	27,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	5,098,409,170	(5,098,409,170)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	229,163,800	291,659,500	(62,495,700)	(21.43)
JUMLAH ASET LANCAR	**256,163,800**	**5,390,068,670**	**(5,133,904,870)**	**(95.25)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,042,273,101	2,723,691,101	318,582,000	11.70
Aset Tetap Lainnya	6,325,000	6,325,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,083,038,369)	(1,901,409,768)	(181,628,601)	9.55
JUMLAH ASET TETAP	**965,559,732**	**828,606,333**	**136,953,399**	**16.53**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	76,010,000	76,010,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(76,010,000)	(76,010,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**1,221,723,532**	**6,218,675,003**	**(4,996,951,471)**	**(80.35)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	134,173,809	0	134,173,809	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	8,082,550	0	8,082,550	0.00
Uang Muka dari KPPN	27,000,000	0	27,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**169,256,359**	**0**	**169,256,359**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**169,256,359**	**0**	**169,256,359**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,052,467,173	6,218,675,003	(5,166,207,830)	(83.08)
JUMLAH EKUITAS	**1,052,467,173**	**6,218,675,003**	**(5,166,207,830)**	**(83.08)**
JUMLAH EKUITAS	**1,052,467,173**	**6,218,675,003**	**(5,166,207,830)**	**(83.08)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,221,723,532**	**6,218,675,003**	**(4,996,951,471)**	**(80.35)**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:02 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	27,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	229,163,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,042,273,101	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,325,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,083,038,369
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	76,010,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	76,010,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	134,173,809
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	8,082,550
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	27,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,791,428,305
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	27,728,300	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,218,675,003
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,552,753,170	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,727,800
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	500
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	26,030,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	379,391,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,413	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,986,142	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,083,427	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,840,945	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	26,143,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	30,344,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,195,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	535,375,440	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	108,540,798	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,357	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,517,332	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,474,994	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24,300,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,781,530	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	10,406,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,620,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	367,046,639	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	90,099,453	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	28,404,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:02 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,140,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	92,775,350	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	767,920,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	513,600,810	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	24,050,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	20,086,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	684,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	212,495,700	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	112,236,150	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	532,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,200,904	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	728,824,240	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181,628,601	0
JUMLAH			**10,392,166,336**	**10,392,166,336**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIAT

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,337,084,305
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	27,728,300	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,727,800
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	338,571,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,902	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30,222,812	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,733,235	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27,360,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,823,892	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	23,319,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	30,344,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,095,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	476,260,440	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	91,048,198	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,270	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,590,732	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,232,498	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	22,680,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,840,070	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,406,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,080,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	367,046,639	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	90,099,453	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24,599,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,140,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	92,775,350	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	767,920,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	513,600,810	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,080,500	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	684,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	150,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	110,762,100	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,700,904	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	728,824,240	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,400,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316,602,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	200
JUMLAH			**4,364,812,805**	**4,364,812,805**

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARSEL D. I. TANEO

197003251998031011

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : (242205) KPU KABUPATEN MALAKA

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,218,675,003	9,449,691,868	(3,231,016,865)	(34.19)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,377,154,665)	(22,694,374,193)	18,317,219,528	(80.71)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,552,753,170)	(555,000)	(2,552,198,170)	459,855.53
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(555,000)	555,000	(100)
LAIN-LAIN	(2,552,753,170)	0	(2,552,753,170)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,763,700,005	20,127,374,576	(18,363,674,571)	(91.24)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,166,207,830)	(2,567,554,617)	(2,598,653,213)	101.21
EKUITAS AKHIR	1,052,467,173	6,882,137,251	(5,829,670,078)	(84.71)

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIS

MARSEL D. I. TANEO

NIP 197003251998031011

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ESELON I : **(01) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

WILAYAH/PROVINSI : **(2400) NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(242205) KPU KABUPATEN MALAKA**

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	42,061	(42,061)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	42,061	(42,061)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	42,061	(42,061)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,678,933,810	1,447,913,960	231,019,850	15.955
Beban Persediaan	0	1,566,433,330	(1,566,433,330)	(100)
Beban Barang dan Jasa	1,794,393,410	16,566,734,909	(14,772,341,499)	(89.169)
Beban Pemeliharaan	24,732,904	109,575,540	(84,842,636)	(77.428)
Beban Perjalanan Dinas	751,224,240	2,882,135,365	(2,130,911,125)	(73.935)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ESELON I : **(01) KOMISI PEMILIHAN UMUM**

WILAYAH/PROVINSI : **(2400) NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(242205) KPU KABUPATEN MALAKA**

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 7:01 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	181,628,601	118,442,150	63,186,451	53.348
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,430,912,965	22,691,235,254	(18,260,322,289)	(80.473)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,430,912,965)	(22,691,193,193)	18,260,280,228	(80.473)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	27,727,800	0	27,727,800	
Pendapatan Pelepasan Aset	27,727,800	0	27,727,800	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26,030,500	(3,181,000)	29,211,500	(918.312)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26,030,500	0	26,030,500	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	3,181,000	(3,181,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	53,758,300	(3,181,000)	56,939,300	(1,789.981)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,377,154,665)	(22,694,374,193)	18,317,219,528	(80.713)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,377,154,665)	(22,694,374,193)	18,317,219,528	(80.713)

Keterangan :

FINAL

Betun, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIAT

MARSEL D. I. TANEO
NIP 197003251998031011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR 01 TAHUN 2026

T E N T A N G
PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 TINGKAT KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan maka perlu ditunjuk/ ditetapkan Tim Pengelola Keuangan untuk Membantu tugas – tugas KPA/PPK/Bendahara Pengeluaran dan bertaggungjawab mengelola pelaksanaan belanja Anggaran Tahun 2026
b. bahwa guna kelancaran Pengelola Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2026, perlu ditunjuk/ ditetapkan Tim Pengelola Keuangan untuk Membantu tugas – tugas KPA/PPK/Bendahara Pengeluaran dan bertaggungjawab mengelola pelaksanaan belanja Anggaran Tahun 2026
c. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Keuangan yang dimaksud;
d. bahwa penunjukan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggra Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023, tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021;
11. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Memperhatikan : 1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA – 076.01.2.242205/2026 Tanggal 01 Desember 2025;

2. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/ atau Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 TINGKAT KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan Sdr. MARSEL D. I TANEO, SH, NIP. 19700325 199803 1 011 Pangkat/Golongan Penata (IV/a) Jabatan Sekretaris pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KEDUA : Menunjuk/Menetapkan Sdri. VERONIKA A. BRIA, SE, NIP. 19830411 200902 2 007 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KETIGA : Menunjuk/Menetapkan Sdr. ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE, NIP. 19821215 200902 1002 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KEEMPAT : Menunjuk/Menetapkan Sdri. MARIA FATIMA BRIA SEO, S.ST, Nip. 19900518 201503 2 005 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KELIMA : Menunjuk/Menetapkan Sdra. DEWINDA GALUH RAHMA PUTRI, S.H Nip. 19980604 202506 2 006 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Staf Pengelola Pengelola Keuangan

KEENAM : Menunjuk/Menetapkan Sdri. FRENDI HIRANDA, SE Nip. 19941028 202506 1 005 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Staf Pengelola Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KETUJUH : Menunjuk/Menetapkan Sdri. VERONIKA JUWITA JACOBA URE MANUK, SE Jabatan staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Staf Pengelola Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KEDELAPAN : Kepada para Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sampai dengan DIKTUM KETUJUH sebagai Tim Pengelola Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026

KESEMBILAN : Kepada para Pejabat sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;

KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan s.d bulan Desember 2026, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 05 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka,

Marsel D. I Taneo

TEMBUSAN :

1. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua;
3. Ketua KPU Kabupaten Malaka di Betun
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TANGGAL : 05 JANUARI TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 TINGKAT KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BESARNYA HONOR (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	MARSEL D. I TANEO, SH NIP. 19700325 199803 1 011	KPA/PPK	IV/a	1.150.000,-
2.	VERONIKA ANGGREINE BRIA, SE NIP.19830401 200902 2 007	Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan an SPM	III/d	470.000,-
3.	ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE NIP.19821215 200902 1 002	Pejabat Pengadaan Barang & Jasa	III/d	680.000,-
4.	MARIA FATIMA BRIA SEO, S.ST NIP. 199003022005012009	Bendahara	III/c	410.000,-
5.	DEWINDA GALUH R. PUTRI, S.H NIP. 19980604 202506 2 006	Staf	III/a	300.000,-
6.	FRENDI HIRANDA, SE NIP. 19941028 202506 1 005	Staf	III/a	300.000,-
7.	VERONIKA J. J. URE MANUK, SE	Staf	Staf Pengelola	300.000,-

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT

Marsel D. I Taneo